



LURAH NGORO-ORO  
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGORO-ORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngoro-oro Tahun 2018 - 2024 yang bersifat tahunan perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 dengan Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan Di Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 65);
17. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kalurahan Ngoro-oro Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2018 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Ngoro-oro (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGORO-ORO  
dan  
LURAH NGORO-ORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2021

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa/kalurahan adalah rencana pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPKKalurahan adalah penjabaran dari RPJMDesa/Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Ngoro-oro Kapanewon Patuk.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Ngoro-oro dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan Ngoro-oro.
5. Lurah adalah Lurah Ngooro-oro Kapanewon Patuk.

Pasal 2

- (1) RPKKalurahan Tahun 2021 disusun berdasarkan RPJMDesa/Kalurahan Tahun 2018 -2024.
- (2) RPKKalurahan sebagaimana disebut ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2021 sampai dengan Desember 2021.

BAB II  
SISTEMATIKA RPKKalurahan

Pasal 3

- (1) RPKKalurahan Tahun 2021 sebagaimana disebut pasal 2 disusun dengan sistematika :
  - Bab I Pendahuluan
  - Bab II Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan
  - Bab III Evaluasi Kegiatan Pembangunan
  - Bab IV Prioritas Pembangunan Kalurahan Tahun 2021
  - Bab V Penutup
- (2) RPKKalurahan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

- (1) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (2) RKP Kalurahan Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Anggaran Biaya kegiatan Tahun Anggaran 2021.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngoro-oro.

Ditetapkan di Ngoro-oro  
pada tanggal 26 Oktober 2020

LURAH,  
ttd

SUKASTO

Diundangkan di Ngoro-oro  
pada tanggal 26 Oktober 2020

CARIK,  
ttd

DALYUNI

LEMBARAN KALURAHAN NGORO-ORO TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN  
PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
TAHUN 2021

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran singkat RPJMDesa/Kalurahan mengenai potensi Kalurahan

Pembangunan pada dasarnya merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki tersebut agar dapat tercapai secara efektif dan efisien diperlukan perencanaan yang sistematis dan matang baik melalui perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendek.

Perencanaan pembangunan kalurahan yang disusun merupakan subsistem dari perencanaan pembangunan daerah dan nasional, sehingga semua dokumen perencanaan kalurahan harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pemerintah kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan kalurahan dalam 2 (dua) tahapan yaitu perencanaan jangka menengah 6 (enam) tahunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kalurahan (RPJMDesa/Kalurahan) dan perencanaan pembangunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa/Kalurahan (RKPDesa/Kalurahan) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan kalurahan.

2. Potensi Sumberdaya kalurahan

Potensi Kalurahan Ngoro-oro yang diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai pendorong dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meliputi :

- a. Adanya hubungan yang sinergi antara Pemerintah Kalurahan dengan Lembaga Kalurahan.
- b. Adanya pembagian tugas dan fungsi pada Struktur Susunan Organisasi.
- c. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik.
- d. Kesadaran Masyarakat untuk membangun yang cukup tinggi.
- e. Jiwa kegotongroyongan yang masih ada.
- f. Banyaknya sumber mata air yang dapat dikembangkan untuk mengatasi kebutuhan air bersih pada masyarakat.
- g. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Potensial untuk usaha ekonomi Produktif.
- h. Jaringan transportasi menjangkau seluruh pelosok Padukuhan.
- i. Banyaknya masyarakat usia produktif.

Disisi lain permasalahan yang dihadapi Kalurahan Ngoro-oro dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan antara lain :

- a. Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan yang kurang memadai sehingga berakibat kurang lancarnya pelaksanaan tugas.
- b. Belum 100 % masyarakat dapat menikmati listrik.
- c. Masih ada masyarakat yang kekurangan air bersih.
- d. Banyak akses jalan yang belum memadai.

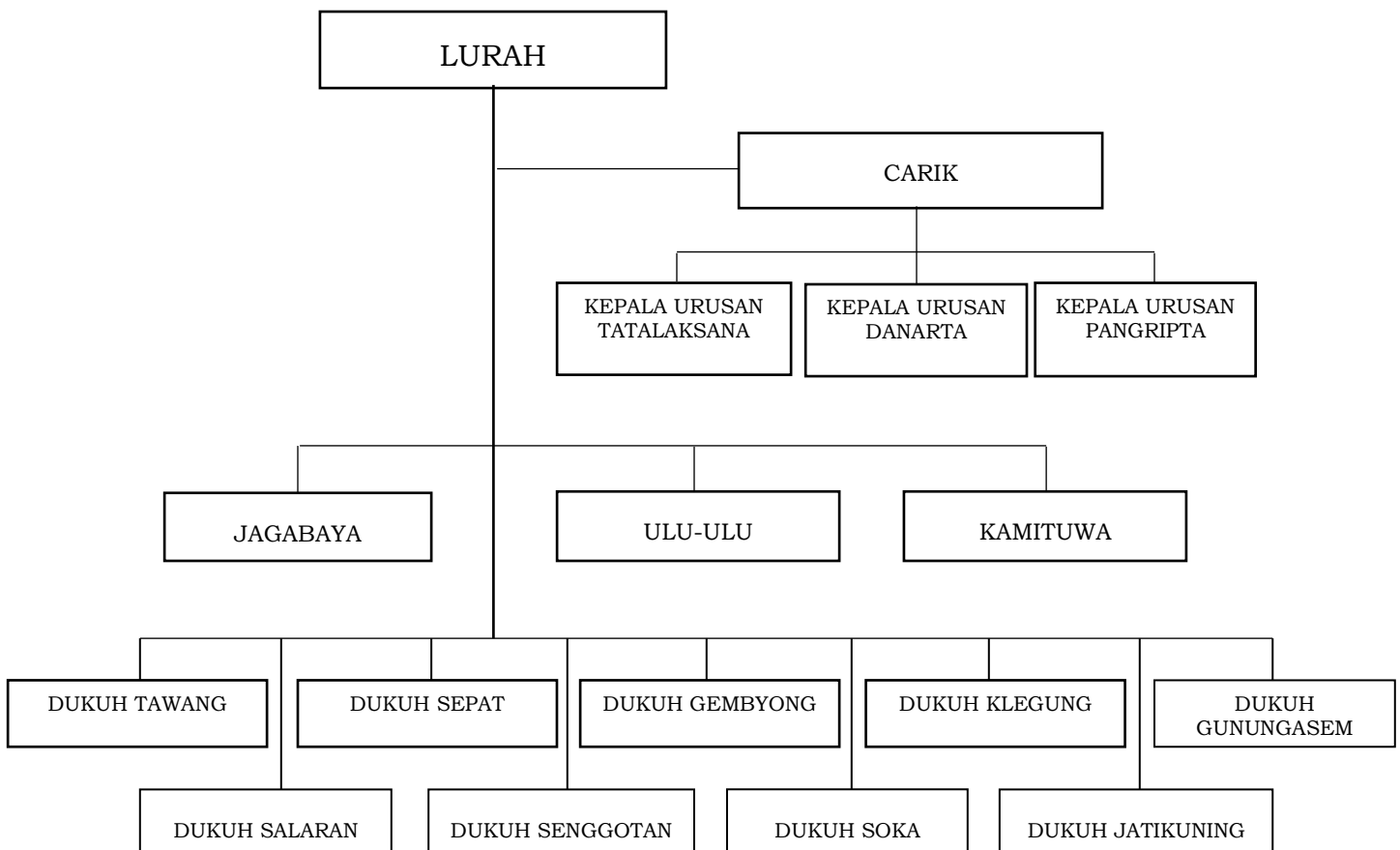
- e. Pungutan Asli desa rendah sehingga masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah.
- f. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur).
- g. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah.
- h. Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat.
- i. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang memadai.
- j. Masyarakat masih enggan meninggalkan sektor pertanian dengan pola tanam tradisional.
- k. Kondisi geografis yang berpegunungan berupa batu bertanah.
- l. Lahan kering dan tandus yang bergantung pada musim dan curah hujan.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam menjalankan tugas dan fungsinya berupaya selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tidak lepas dengan keberadaan lembaga kalurahan dan dukungan SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan yang ada. Adapun SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan yang ada terdiri dari :

- Lurah : 1 orang;
- Carik : 1 orang;
- Kepala Urusan : 3 orang;
- Jagabaya : 1 orang;
- Ulu-Ulu : 1 orang;
- Kamituwa : 1 orang;
- Dukuh : 9 orang;
- Staf Pamong Kalurahan : 4 orang.

Bagan Struktur Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro, mengacu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2019 jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Nomor 20 Tahun 2020, digambarkan sebagai berikut :



#### 4. Pengertian RPKKalurahan

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RPKKalurahan) merupakan dokumen perencanaan kalurahan dalam periode 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMKalurahan yang memuat rancangan kerangka ekonomi kalurahan, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan RPJMDesa/Kalurahan.

#### 5. Fungsi RPKKalurahan dalam penyelenggaraan pembangunan kalurahan

Tersedianya dokumen RPKKalurahan diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kalurahan (APBDesa/Kalurahan) serta sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan baik di bidang pemerintahan, ekonomi, sarana-prasarana, bidang sosial budaya, dan rencana kerangka regulasi kalurahan.

#### 6. Proses penyusunan RPKKalurahan

Penyusunan Perencanaan kalurahan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai wujud peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan kalurahan yang merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Proses penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, sehingga prinsip partisipatif dalam tahapan proses perencanaan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta sinergi program/kegiatan dalam mengatasi permasalahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Pada sisi lain kultur masyarakat kalurahan yang berupa rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong merupakan modal dasar kekuatan membangun kalurahan. Kultur ini hendaknya perlu dijaga dan dilestarikan guna percepatan dalam mewujudkan pembangunan kalurahan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

#### 7. Keterkaitan RPKKalurahan dengan dokumen perencanaan lainnya :

##### a. RPKKalurahan dengan RPJMKalurahan

RPKKalurahan dalam penyusunannya tiap tahun berpedoman kepada RPJMDesa/Kalurahan.

##### b. RPKKalurahan dengan RAPBKalurahan

RPKKalurahan sebagai pedoman penyusunan APBKalurahan

##### c. RPKKalurahan dengan DURKPKalurahan

RPKKalurahan memuat Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (DURKPKalurahan) sebagai bahan materi usulan pada musyawarah perencanaan pembangunan kapanewon (musrenbang) kapanewon.

### B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah  
Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor  
11 Tahun 2019;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021;
16. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa.
17. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024.
18. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Ngoro-oro.

### C. Tujuan

#### 1. Tujuan

RKPKalurahan disusun dengan tujuan :

- a. Menyiapkan daftar program kegiatan tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pemerintah kalurahan yang disepakati untuk dilaksanakan dalam RKP-Kalurahan Tahun 2021 sumber pendanaannya dari APBKalurahan.
- b. Menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan (DURKPKalurahan) yang didanai APBD Kabupaten, APBD DIY dan/atau APBN Tahun 2022 untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui panewu sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten; dan usulan kegiatan untuk dibiayai Dana Keistimewaan Tahun 2023 (Bidang Infrastruktur, Bidang Perekonomian, serta Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya).

#### 2. Manfaat

Manfaat disusunnya RKPKalurahan meliputi :

- a. Tersedianya acuan dalam penentuan alokasi pendanaan, lokasi aktivitas, waktu pelaksanaan;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar kalurahan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara kabupaten dan kalurahan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan berkelanjutan.

#### D. Visi dan Misi Kalurahan.

##### 1. Visi

Visi adalah hal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kalurahan (RPJM-Desa) Ngoro-oro Tahun 2018 – 2024, yaitu : MEWUJUDKAN MASYARAKAT NGORO-ORO YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA.

##### *Penjelasan Visi*

“Mewujudkan masyarakat” adalah upaya untuk melaksanakan /mencita-citakan kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur, memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antar individu dan secara kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya.

“Maju” adalah usaha/upaya untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik, mencapai atau berada pada tingkatan peradapan yang lebih tinggi, utamanya dalam pendidikan, ekonomi, keagamaan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta bidang lainnya.

“Damai” adalah sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia di mana tidak ada perseteruan, kekerasan ataupun konflik.

“Sejahtera” adalah suatu keadaan masyarakat Kalurahan Ngoro-oro yang aman sentosa dan makmur serta selamat terlepas dari gangguan.

##### *Rangkuman Penjelasan Visi*

Perwujudan desa yang mencapai tingkat peradapan lebih tinggi, masyarakatnya harmonis dimana tidak ada perseteruan, kekerasan atau konflik, aman dan makmur serta terlepas dari gangguan maupun bencana.

##### 2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Kalurahan untuk mewujudkan Visi. Selanjutnya, berdasarkan visi kalurahan tersebut di atas, ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Kalurahan 2018 – 2024, yaitu :

- 1) Meningkatkan kinerja perangkat sesuai Standar Operasional dan Prosedur.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa/kalurahan secara terbuka dan menyeluruh.
- 3) Memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Meningkatkan sumber daya masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
- 5) Mengangkat potensi lokal pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai daya dukung ekonomi masyarakat serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

- 6) Mengangkat seni budaya dan meningkatkan perikehidupan keagamaan.
- 7) Mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata untuk kemakmuran masyarakat.

#### *Penjelasan masing-masing Misi*

##### Misi Kesatu

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk meningkatkan kualitas serta kemampuan pamong kalurahan untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas serta kompetensi SDM Pamong Kalurahan dalam melaksanakan Perencanaan, Pengawasan, Kesadaran dan ketaatan terhadap aturan, sistem keuangan dan pengelolaan Kekayaan Asli Desa sesuai dengan perundang-undangan.

##### Misi Kedua

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam mewujudkan asas keterbukaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, mengoptimalkan jalinan komunikasi dengan elemen kelembagaan kalurahan supaya tercipta sinergi antara pemerintah kalurahan dengan kelembagaan kalurahan yang ada.

##### Misi Ketiga

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam mewujudkan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat yang meliputi pelayanan perihal administrasi umum dan kependudukan serta pelayanan perihal sosial kemasyarakatan.

##### Misi Keempat

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan menjaga perilaku hidup sehat yang meliputi penuntasan wajib belajar 9 (sembilan), penyediaan fasilitas pendidikan, pelaksanaan jam belajar masyarakat, penyuluhan kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan serta pemberian pelatihan kader dan insentif kader kesehatan.

##### Misi Kelima

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan perekonomian masyarakat, yang meliputi usaha pelatihan kewirausahaan, pelatihan koperasi/UMKM, pencegahan terhadap jeratan rentenir dan pelatihan pengembangan jaringan pemasaran.

##### Misi Keenam

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk mewujudkan masyarakat yang mencintai seni budaya dengan tetap berpegang teguh terhadap ajaran dan nilai-nilai agama yang dianutnya, yang meliputi pelatihan kesenian bagi masyarakat, pemberian insentif pelatih, melaksanakan perayaan hari besar keagamaan, pelatihan/pembinaan ustadz/ustadzah, pembinaan/pelatihan rois.

##### Misi Ketujuh

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk mewujudkan masyarakat yang lebih makmur dengan menggali dan mengeksplorasi potensi pariwisata, yang meliputi peningkatan profesionalisme pengurus dan pengelola pariwisata, penyempurnaan sarana dan prasarana pendukung unit wisata, pembukaan obyek wisata baru dan kerjasama dengan investor/pihak lain untuk pengembangan wisata.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk menjadikan masyarakat mencapai tingkat peradapan lebih tinggi, secara harmonis dimana tidak ada perseteruan, kekerasan atau konflik, aman dan makmur serta terlepas dari gangguan maupun bencana.

Selanjutnya ketujuh misi tersebut di atas diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan program pembangunan Kalurahan Ngoro-oro sebagai berikut:

#### MISI TUJUAN

NO	MISI	TUJUAN
1	Meningkatkan kinerja pamong sesuai Standar Operasional dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan pamong Kalurahan yang sadar dan berkapasitas sesuai dengan tupoksi masing-masing</li> <li>2. Mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar kompetensi</li> <li>3. Mewujudkan peran serta aktif lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di kalurahan Ngoro-oro</li> </ol>
2	Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kalurahan secara terbuka dan menyeluruh	Mewujudkan sinergi antara pemerintah dengan dengan lembaga-lembaga yang ada di kalurahan
3	Memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal
4	Meningkatkan sumber daya masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan pengembangan pendidikan dan kesehatan, dan lingkungan masyarakat
5	Mengangkat potensi lokal pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai daya dukung ekonomi masyarakat serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan	Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kesejahteraan dan perekonomian masarakat
6	Mengangkat seni budaya dan meningkatkan perikehidupan kegamaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan masyarakat yang memegang teguh warisan budaya</li> <li>2. Mewujudkan masyarakat agamis</li> </ol>
7	Mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata untuk kemakmuran masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola obyek wisata secara transparan dan akuntabel</li> <li>2. Meningkatkan daya tarik dan daya saing pariwisata</li> </ol>

BAB II  
GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Kalurahan Ngoro-oro berada di wilayah Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, dengan jarak pusat pemerintahan dengan ibu kota Kapanewon ± 7 km, jarak dengan ibu kota Kabupaten ± 27 km, jarak dengan ibu kota Provinsi ± 37 km, jarak dengan ibu kota Pemerintah Pusat ± 780 km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kalurahan Gayamharjo/ Wukirharjo  
Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kalurahan Terbah Kapanewon Patuk
- Sebelah Selatan : Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk
- Sebelah Barat : Kalurahan Patuk Kapanewon Patuk

Ketinggian tanah di Kalurahan Ngoro-oro rata-rata 355 m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 2300 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 180 hari per tahun. Puncak hujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret tiap tahunnya. Suhu udara berkisar antara 24<sup>o</sup>C sampai dengan 34<sup>o</sup>C.

Dengan demikian Kalurahan Ngoro-oro disamping sektor pertanian masih dapat dikembangkan sektor perkebunan, kehutanan, peternakan dan lain sebagainya.

B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Kebijakan Pendapatan Kalurahan Ngoro-oro Tahun 2021 diproyeksikan bersumber dari mana saja beserta targetnya, seperti pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1.  
PENDAPATAN KALURAHAN NGORO-ORO TAHUN 2021

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2020)	Proyeksi (n-1/2021)	
4	PENDAPATAN			
4 1	Pendapatan Asli Desa	12,865,600	6,250,000	
4 1 1	Hasil Usaha	4,000,000	4,500,000	
4 1 1 1	Bagi Hasil BUMDes	4,000,000	4,500,000	
4 1 2	Hasil Aset	1,700,000	1,000,000	
4 1 2 1	Pengelolaan tanah milik Desa			
4 1 2 3	Pasar Desa	1,200,000		
4 1 2 7	Kios Milik Desa			
4 1 2 8	Pemanfaatan lapangan/prasarana olah raga milik Desa			
4 1 2 90	Obyek rekreasi yang dikelola desa;			
4 1 2 91	Balai desa	500,000	1,000,000	
4 1 2 92	Kantor desa;			
4 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	

4 1 3 1	Swadaya, partisipasi dan gotong royong			
4 1 4	Pendapatan Asli Desa Lain	7,165,600	750,000	
4 1 4 1	Hasil Pungutan Desa			
4 1 4 90	Penjualan hasil hutan milik desa;			
4 1 4 91	Hasil penjualan/penghapusan aset/barang milik desa			
4 1 4 93	Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan desa	6,415,600		
4 1 4 94	Pendapatan denda sewa-menyewa aset desa			
4 1 4 96	Hasil pengelolaan tanah kas desa	750,000	750,000	
4 1 4 97	Hasil pelepasan tanah desa			
4 2	Transfer	1,509,249,100	1,509,249,100	
4 2 1	Dana Desa	826,301,000	826,301,000	
4 2 1 1	Dana Desa	826,301,000	826,301,000	
4 2 2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	35,146,300	35,146,300	
4 2 2 1	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	35,146,300	35,146,300	
4 2 2 90	Kekurangan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten			
4 2 3	Alokasi Dana Desa	647,801,800	647,801,800	
4 2 3 1	Alokasi Dana Desa	647,801,800	647,801,800	
4 2 4	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	
4 2 4 1	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			
4 2 4 90	Bantuan pemberdayaan masyarakat desa			
4 2 4 91	Bantuan sarana prasarana kantor desa			
4 2 4 92	Bantuan pengembangan pariwisata/budaya			
4 2 4 93	Bantuan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur desa			
4 2 5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	-	-	
4 2 5 1	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota			

4 2 5 90	Bantuan keuangan untuk pembangunan padukuhan			
4 2 5 91	Bantuan pelaksanaan Pilkades			
4 2 5 97	Bantuan pembangunan pasar desa			
4 2 5 99	Bantuan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur desa			
4 3	Pendapatan Lain	56,497,980	54,000,000	
4 3 1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	-	-	
4 3 1 1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4 3 2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	-	-	
4 3 2 1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4 3 3	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	50,000,000	50,000,000	
4 3 3 1	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	50,000,000	50,000,000	
4 3 4	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	
4 3 4 1	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4 3 5	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	2,997,980	-	
4 3 5 1	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	2,997,980		
4 3 6	Bunga Bank	3,500,000	4,000,000	
4 3 6 1	Bunga Bank	3,500,000	4,000,000	
4 3 9	Pendapatan Lain Desa yang sah	-	-	
4 3 9 90	Insentif/hadiah desa lunas PBB			
4 3 9 91	Hadiah perlombaan			
	JUMLAH PENDAPATAN	1,578,612,680	1,569,499,100	

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Memuat arah kebijakan prioritas belanja Kalurahan Tahun 2021 diarahkan untuk apa saja, seperti pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2.  
BELANJA KALURAHAN NGORO-ORO TAHUN 2021

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2020)	Proyeksi (n-1/2021)	
5.	BELANJA			
5.01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	3,159,168,322	3,148,072,939	
5.01.01.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	726,662,937	734,554,300	
5.1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39,000,000	39,000,000	ADD, PAD
5.1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	506,770,000	524,972,500	ADD, PAD
5.1.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	51,858,789	53,308,524	ADD
5.1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	56,734,148	46,223,276	ADD
5.1.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	42,250,000	42,250,000	ADD, PAD
5.1.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8,480,000	7,180,000	ADD
5.1.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21,570,000	21,620,000	PAD, DLL
5.1.02.	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	131,507,885	98,229,885	
5.1.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1,400,000	1,700,000	DLL
5.1.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2,574,000	2,574,000	PBH
5.1.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	79,133,885	79,155,885	DLL
5.1.02.90.	Pengadaan peralatan kerja	40,000,000	5,000,000	PBH
5.1.02.91.	Pengadaan mebeleur		3,000,000	PAD, PBH
5.1.02.94.	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3,600,000	2,300,000	PAD
5.1.02.95.	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	4,800,000	3,000,000	PAD
5.1.02.96.	Pengadaan mesin/kartu absensi		1,500,000	PAD
5.1.03.	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15,775,500	13,776,500	



5.1.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7,037,500	7,037,500	PAD, DDS
5.1.03.03.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2,500,000	2,500,000	PBH
5.1.03.90	Penyusunan monografi desa	1,200,000	1,200,000	PAD, DLL
5.1.03.91	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	5,038,000	3,039,000	PAD
5.1.04.	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	60,949,000	53,105,000	
5.1.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10,150,000	10,050,000	PAD
5.1.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6,069,500	6,069,500	PBH
5.1.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	3,378,000	3,378,000	ADD, DLL
5.1.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5,321,000	4,721,000	PAD
5.1.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2,400,000	2,400,000	PBH
5.1.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3,710,500	1,855,500	PAD
5.1.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	950,000	950,000	PBH
5.1.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	4,580,000	4,580,000	PAD, DDS
5.1.04.90	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	2,950,000	2,350,000	PAD
5.1.04.91	Pengisian pamong kalurahan	18,290,000	16,751,000	PAD
5.1.04.95	Pengadaan pakaian dinas/seragam	3,150,000		PAD
5.1.05.	Sub Bidang Pertanahan	2,224,273,000	2,248,407,254	
5.1.04.90	Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	2,219,623,000	2,244,807,254	PAD
5.1.05.94	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	4,650,000	3,600,000	PAD, PBH
5.02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	451,323,423	747,951,000	
5.2.01.	Sub Bidang Pendidikan	34,200,000	42,722,000	
5.2.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madr asah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	29,100,000	32,492,000	DDS
5.2.01.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	-	3,000,000	DDS
5.2.01.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana	5,100,000	2,130,000	DDS

	Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa			
5.2.01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)		5,100,000	DDS
5.2.02.	Sub Bidang Kesehatan	158,418,923	173,408,923	
5.2.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	75,875,000	87,755,000	DDS
5.2.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	21,283,263	12,283,263	DDS
5.2.02.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9,310,000	17,520,000	DDS
5.2.02.90	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	36,650,000	33,750,000	DDS
5.2.02.94	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD		5,500,000	DDS
5.2.02.98	Insentif kader kesehatan/KB	15,300,660	16,600,660	DDS
5.2.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	212,389,500	449,682,077	
5.2.03.10	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa	-	116,944,577	DDS
5.2.03.11	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	-	-	DDS
5.2.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	212,389,500	332,737,500	DDS
5.2.03.19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)		-	DDS
5.2.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	41,560,000	77,638,000	
5.2.04.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	-	-	DDS
5.2.04.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	-	36,078,000	DDS
5.2.04.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	-	-	DDS
5.2.04.91	Pemberian stimulan jamban sehat	41,560,000	41,560,000	DDS
5.2.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4,755,000	4,500,000	
5.2.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4,755,000	4,500,000	DDS
5.2.06.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	-	-	DDS
5.2.08.	Sub Bidang Pariwisata	-	-	

5.2.08.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	-	-	DDS
5.03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	63,071,550	52,363,850	
5.3.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24,175,600	17,456,000	
5.3.01.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	12,055,600	6,546,000	PBH
5.3.01.90	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2,785,000	5,610,000	PBH
5.3.01.93	Pembinaan Jaga Warga	9,335,000	5,300,000	PBH
5.3.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16,623,100	12,200,000	
5.3.02.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	-	-	PAD
5.3.02.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	-	-	PAD
5.3.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	7,120,600	6,200,000	PAD, DLL
5.3.02.90	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	9,502,500	6,000,000	PAD, DLL
5.3.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6,052,500	6,297,500	
5.3.03.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	-	-	PBH
5.3.03.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	-	-	DLL
5.3.03.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	1,180,000	1,180,000	DLL
5.3.03.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3,275,000	3,275,000	DLL
5.3.03.93	Operasional Karang Taruna	1,597,500	1,842,500	PBH
5.3.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16,220,350	16,410,350	
5.3.04.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2,155,000	2,155,000	DLL
5.3.04.03	Pembinaan PKK	2,167,500	2,167,500	DLL
5.3.04.04	Pelatihan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	-	-	DLL
5.3.04.92	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	5,412,500	5,412,500	DLL
5.3.04.95	Operasional LPMD dan/atau LPMD	1,725,000	1,915,000	PBH
5.3.04.96	Operasional PKK	4,760,350	4,760,350	PBH

5.04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	86,214,000	118,235,000	
5.4.01.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	14,326,000	
5.4.01.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	-	14,326,000	DDS
5.4.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	-	3,945,000	
5.4.02.91	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	-	-	DDS
5.4.02.92	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	-	3,945,000	DDS
5.4.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	-	7,125,000	
5.4.04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	-	7,125,000	DDS
5.4.06.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	6,625,000	
5.4.06.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	-	6,625,000	DDS
5.4.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	86,214,000	86,214,000	
5.4.07.02	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	86,214,000	86,214,000	PAD
5.05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	369,500,000	38,711,500	
5.5.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	35,600,000	9,894,000	
5.5.01.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	35,600,000	9,894,000	DDS
5.5.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat	333,900,000	6,317,500	
5.5.02.01	Penanganan Keadaan Darurat	333,900,000	6,317,500	DDS
5.5.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak		22,500,000	
5.5.03.01	Penanganan Keadaan Mendesak		22,500,000	DDS
	JUMLAH BELANJA	4,129,277,295	4,105,334,289	

### 3. Kebijakan Pembiayaan

Memuat arah kebijakan pembiayaan tahun rencana, terdiri dari proyeksi penerimaan pembiayaan Tahun 2021 (SILPA) dan proyeksi pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal desa), seperti dalam tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3.  
PEMBIAYAAN KALURAHAN NGORO-ORO TAHUN 2021

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2020)	Proyeksi (n-1/2021)	
6 1	Penerimaan Pembiayaan	2,535,835,189	185,500,000	
6 1 1	SILPA Tahun Sebelumnya	2,535,835,189	185,500,000	

6 1 1 1	SILPA Tahun Sebelumnya	2,535,835,189	185,500,000	
6 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
6 1 2 1	Pencairan Dana Cadangan			
6 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	-	-	
6 1 3 1	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan			
6 1 9	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	
6 1 9 90	Penerimaan Pembiayaan Lainnya			
6 2	Pengeluaran Pembiayaan	69,000,000	-	
6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
6 2 1 1	Pembentukan Dana Cadangan			
6 2 2	Penyertaan Modal Desa	69,000,000	-	
6 2 2 1	Penyertaan Modal Desa	69,000,000	-	
6 2 9	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	
6 2 9 90	Pengeluaran Pembiayaan lainnya			

### BAB III EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

#### A. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RPKKALURAHAN TAHUN 2020

Pada tahun anggaran 2020 Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro memiliki program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik. Program yang disusun disesuaikan dengan kemampuan pemerintah kalurahan dan perkiraan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah.

Dalam pelaksanaannya masih banyak program dan kegiatan yang belum seluruhnya dapat terealisasi, hal ini disebabkan :

1. Keterbatasan pembiayaan yang diterima oleh kalurahan;
2. Swadaya masyarakat yang masih sangat rendah;
3. Pengalihan penggunaan dana kepada bidang lain yang masih dalam ruanglingkup pelaksanaan RPJMKalurahan yang lebih mendesak yaitu untuk kegiatan penanggulangan bencana non alam (pandemi COVID-19) dan kegiatan penanganan stunting.

Capaian target berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun 2020 disajikan dalam Tabel 3.1.

#### B. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMKalurahan

1. Pendapatan Asli Desa/Kalurahan yang sangat terbatas
2. Bantuan dana dari pemerintah yang masih sedikit.

#### C. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PROGRAM PEMBANGUNAN

1. Program pembangunan yang masuk dalam prioritas kalurahan belum semuanya bisa terdani karena perubahan kebijakan pemerintah untuk difokuskan kegiatan penanggulangan bencana non alam (COVID-19) dan kegiatan pencegahan stunting.
2. Partisipasi/Swadaya masyarakat berupa bahan/material masih sangat terbatas.

## BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2021

Prioritas program kegiatan skala kalurahan atau kegiatan yang bisa diselesaikan melalui dana APBKalurahan Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
2. Program Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
3. Program Pembinaan Kemasyarakatan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat, dan
5. Program Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

Prioritas program kegiatan skala Kalurahan Tahun 2021 disajikan dalam tabel 4.1.

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan (DURKPKalurahan) yang didanai APBD Kabupaten, APBD DIY dan/atau APBN Tahun 2022, dan usulan kegiatan untuk dibiayai Dana Keistimewaan Tahun 2023 disajikan dalam tabel 4.2.

## BAB V PENUTUP

RKPKalurahan merupakan pedoman bagi pemerintah kalurahan dalam peyusunan APBKalurahan maupun pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan RPJMKalurahan.

Penyusunan RKPKalurahan melibatkan keterwakilan dari semua unsur/elemen masyarakat Kalurahan diantaranya : Pemerintah Kalurahan, BPK, LKD, KPMK, Tokoh masyarakat, pemuka pendidikan, Forum Anak, TKPK Kalurahan, BUMKal, kelompok perempuan, kelompok rentan (difabel, miskin, lansia) dll, dengan beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari musyawarah kalurahan dan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan sampai kepada di peroleh rancangan Akhir RKPKalurahan.

Dokumen RKPKalurahan diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan kerja yag akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, sehingga kegiatan pembangunan akan memberikan manfaat bagi kinerja Pemerintah Kalurahan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Ngoro-oro.

Ngoro-oro, 26 Oktober 2020  
Lurah,

ttd

SUKASTO



TABEL 3.1.  
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2020

No	Uraian	Keluaran	Lokasi	Target Capaian Tahun 2019	Realisasi Capaian s/d akhir Juni 2020	Proyeksi Realisasi Capaian s/d akhir Tahun 2020	Swadaya (Rp)	APBDes (Rp)							Ket.	
								PADes	Dana Desa	ADD	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Retribusi		Pendapatan Lain-lain
											APBD DIY	APBD Kab				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>100%</b>	<b>13.1%</b>	<b>75%</b>	<b>0</b>	<b>2,394,810,000</b>	<b>0</b>	<b>663,230,937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,019,500</b>	<b>2,574,000</b>	<b>80,533,885</b>	
1.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			<b>100%</b>	<b>50.7%</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>66,810,000</b>	<b>0</b>	<b>659,852,937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Kades	Desa	100%	53.85%	100%	0	3,000,000	0	36,000,000	0	0	0	0	0	
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	100%	54.58%	100%	0	38,360,000	0	468,410,000	0	0	0	0	0	
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terbayarnya jaminan sosial Kades dan Perangkat Desa	Desa	100%	45.59%	99%	0	0	0	51,858,789	0	0	0	0	0	
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Lancarnya beban Oprasional Pemerintah Desa	Desa	100%	18.28%	98%	0	630,000	0	56,104,148	0	0	0	0	0	



3.	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>69%</b>	<b>0</b>	<b>15,775,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Dokumen kependudukan dan potensi desa	Desa	100%	0%	50%	0	7,037,500	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Tertatanya dokumen/arsip yang baik	Desa	100%	0%	75%	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penyusunan monografi desa	Dokumen monografi desa yang informatik	Desa	100%	0%	100%	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Basis data terpadu RTM	Desa	100%	0%	50%	0	5,038,000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			<b>100%</b>	<b>28,66%</b>	<b>87%</b>	<b>0</b>	<b>50,551,500</b>	<b>0</b>	<b>3,378,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,019,500</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Dokumen perencanaan desa yang partisipatif	Desa	100%	0%	100%	0	10,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Data RTM yang akurat dan pengelolaan BUMDes yang akuntabel	Desa	100%	0%	50%	0	0	0	0	0	0	6,069,500	0	0	0
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Dokumen RKP Desa	Desa	100%	0%	100%	0	0	0	3,378,000	0	0	0	0	0	0



	2	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	Terbayarnya honir tim intensifikasi PBB	Desa	100%	0%	80%	0	4,650,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>				<b>100%</b>	<b>13.5%</b>	<b>46%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451,323,423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Sub Bidang Pendidikan				<b>100%</b>	<b>29.7%</b>	<b>50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Terbayarnya honor Guru PAUD dan TK	Desa	100%	32.99%	100%	0	0	29,100,000	0	0	0	0	0	0
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar	Perpustakaan lebih aman dan nyaman	Desa	100%	0.00%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Terbayarnya honor pengelola perpustakaan	Desa	100%	10.84%	50%	0	0	5,100,000	0	0	0	0	0	0
2.	Sub Bidang Kesehatan				<b>100%</b>	<b>30.0%</b>	<b>91%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158,418,923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Honor kader dan PMT	Desa	100%	32.42%	85%	0	0	75,875,000	0	0	0	0	0	0
	2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Pencegahan stunting	Desa	100%	13.20%	90%	0	0	21,283,263	0	0	0	0	0	0
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Tersedianya prasarana posyandu	Desa	100%	0%	100%	0	0	9,310,000	0	0	0	0	0	0
	4	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Terselenggaranya kegiatan Posbindu	Desa	100%	38.02%	80%	0	0	36,650,000	0	0	0	0	0	0

	5	Insentif kader kesehatan/KB	Terbayarnya insentif Kader	Desa	100%	40.85%	100%	0	0	15,300,660	0	0	0	0	0	0
3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212,389,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Talud yang baik	Jatikuning	100%	0%	100%	0	0	212,389,500	0	0	0	0	0	0
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	Embung untuk pengairan dan pariwisata	Desa	100%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Usaha Tani														
4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>33%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,560,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	Terpeliharanya sumber mata air dan tandon air	Sepat, Gembyong	100%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Tersedianya fasilitas pengelolaan sampah	Desa	100%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Pemberian stimulan jamban sehat	Jamban sehat bagi RTM	Desa	100%	0%	100%	0	0	41,560,000	0	0	0	0	0	0
	4	Pembangunan/Rehabilitasi sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll)														
5.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			<b>100%</b>	<b>34%</b>	<b>49%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,755,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Baliho/ poster informasi desa	Desa	100%	67.30%	98%	0	0	4,755,000	0	0	0	0	0	0











Tabel 4.1.  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2021

KALURAHAN : NGORO-ORO  
KAPANEWON : PATUK  
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL  
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber (PADes,Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bant. Keu. APBD DIY, Ban.Keu APBD kab, Pendapatan Lain-Lain)	Swakelola Desa	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>												
1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa						<b>734,554,300</b>						
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kalurahan	13 OB	Lurah	12 bulan	39,000,000	ADD,PAD	√	.			Januari - Desember	
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kalurahan	252 OB	Pamong dan Staf Pamong Kalurahan	12 bulan	524,972,500	ADD,PAD	√	.			Januari - Desember	
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kalurahan	252 OB	Lurah, Pamong dan Staf Pamong	12 bulan	53,308,524	ADD	√	.			Januari - Desember	
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	46,223,276	ADD	√				Januari - Desember	
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Kalurahan	117 OB	Anggota BPK	12 bulan	42,250,000	ADD,PAD	√	.			Januari - Desember	
6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Kalurahan	1 Ls	Anggota BPK	12 bulan	7,180,000	ADD	√	.			Januari - Desember	
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kalurahan	612 OB	Ketua RT/RW	12 bulan	21,620,000	DLL	√	.			Januari - Desember	
2	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa						<b>98,229,885</b>						

1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Kalurahan	1 Unit	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	1,700,000	DLL	√			Juni
2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	2,574,000	PBH	√			Juli
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Kalurahan	1 Unit	Pemerintah Kalurahan	2 bulan	79,155,885	DLL	√			Juni - Juli
4	Pengadaan peralatan kerja	Kalurahan	2 Unit	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	5,000,000	PBH	√			Agustus
5	Pengadaan mebeleur	Kalurahan	3 Unit	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	3,000,000	PBH	√			Juli
6	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	2,300,000	PAD	√			Januari - Desember
7	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	3,000,000	PAD	√			Januari - Desember
8	Pengadaan mesin/kartu absensi	Kalurahan	1 Unit	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	1,500,000	PAD	√			Januari
3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan					<b>13,776,500</b>					
1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan Masyarakat	2 bulan	7,037,500	DDS	√	.		Juli, Desember
2	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	2,500,000	PBH	√			Pebruari
3	Penyusunan monografi desa	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	2 bulan	1,200,000	DLL	√	.		Juli, Desember
4	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	1 bulan	3,039,000	PAD	√	.		Januari/Pebruari
4	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan					<b>53,105,000</b>					
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal, BPK dan Masyarakat	3 bulan	10,050,000	DLL	√			Agustus, September, Desember
2	Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal, BPK dan Masyarakat	2 bulan	6,069,500	PBH	√			Pebruari, November
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan BPK	2 bulan	3,378,000	DLL	√			Oktober, November
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan BPK	3 bulan	4,721,000	PAD	√			Januari, Agustus, Desember
5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Kalurahan	36 OB	Petugas Aset	4 bulan	2,400,000	PBH	√			Januari - Desember
6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan BPK	3 bulan	1,855,500	PAD	√			Juni, Agustus, Oktober

	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	3 bulan	950,000	PBH	√			Januari - Maret	
	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kalurahan	1 Ls	Pengelola SID	12 bulan	4,580,000	DDS	√	.		Januari - Desember	
	9	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Kalurahan	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	12 bulan	2,350,000	PAD	√			Januari - Desember	
	10	Pengisian perangkat desa/Staf Perangkat Desa	Kalurahan	1 orang	Masyarakat	3 bulan	16,751,000	PAD	√			Januari - Maret	
5	Sub Bidang Pertanahan						<b>2,248,407,254</b>						
	1	Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	Kalurahan	1 paket	Pamong Kalurahan	12 bulan	2,244,807,254	PAD			√	Januari - Desember	
	2	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	Kalurahan	10 orang	Koordinator dan Petugas Pungut	3 bulan	3,600,000	PBH	√			April - September	
Jumlah Per Bidang 1							<b>3,148,072,939</b>						
<b>2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>												
1	Sub Bidang Pendidikan						<b>42,722,000</b>						
	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Kalurahan	96 OB	Guru PAUD/TK	12 bulan	32,492,000	DDS	√	.		Januari - Desember	
	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	1 bulan	3,000,000	DDS	√			Mei	
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	1 bulan	2,130,000	DDS	√			Maret, April	
	4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Kalurahan	12 OB	Petugas Perpustakaan	12 bulan	5,100,000	DDS	√	.		Januari - Desember	
2	Sub Bidang Kesehatan						<b>176,908,923</b>						
	1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Kalurahan	1092 OB	Kader, Bumil dan Balita	12 bulan	87,755,000	DDS	√	.		Januari - Desember	
	2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kalurahan	1 Ls	KPM dan Masyarakat	12 bulan	12,283,263	DDS	√	.		Januari - Desember	
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	1 bulan	17,520,000	DDS	√			Pebruari	
	4	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Kalurahan	540 OB	Kader Posbindu	12 bulan	33,750,000	DDS	√			Januari - Desember	
	5	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Kalurahan	174 Anak	Anak Balita/PAUD	12 bulan	5,500,000	DDS	√			Januari - Desember	
	6	Insentif kader kesehatan/KB	Kalurahan	492 OB	Kader kesehatan	12 bulan	16,600,660	DDS	√	.		Januari - Desember	
	7	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader	Kalurahan	1 Kali	Kader kesehatan	1 bulan	3,500,000	DDS	√	.		Maret	

		Kesehatan, dll)										
	8	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	1 bulan		DDS	√	.		Mei
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						<b>449,682,077</b>					
	1	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa	Soka	78.90 m3	Masyarakat	2 bulan	116,944,577	DDS	√			Juli - Agustus
	2	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang			Masyarakat		-	DDS	√			
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Klegung, Tawang	182.95 m3 128.19 m3	Masyarakat	4 bulan	332,737,500	DDS	√			Juli - Oktober
	4	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa	Kalurahan	1 Unit	Masyarakat		-	DDS	√			
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman						<b>77,638,000</b>					
	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)			Masyarakat		-	DDS	√	..		
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	Sepat	1 Ls	Masyarakat	2 bulan	36,078,000	DDS	√			Pebruari - Maret
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Kalurahan		Bank Sampah		-	DDS	√			
	4	Pemberian stimulan jamban sehat	Kalurahan	11 RTM	RTM/Masyarakat	3 bulan	41,560,000	DDS	√	..		Mei - Juli
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika						<b>4,500,000</b>					
	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan Masyarakat	12 bulan	4,500,000	DDS	√			Januari - Desember
	2	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Kalurahan		Pemkal dan Masyarakat		-	DDS	√			
5	Sub Bidang Pariwisata						-					
	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Kalurahan		Pemkal dan Masyarakat		-	DDS	√			
Jumlah Per Bidang 2						<b>751,451,000</b>						
<b>3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>											
	1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				<b>17,456,000</b>						
	1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Kalurahan	1 Ls	Linmas kalurahan	4 bulan	6,546,000	PBH	√			Maret, Juni, September, Desember
	2	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Kalurahan		KSB, Sibat dan Monjj			PBH	√			

	3	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Kalurahan	1 Ls	KSB, Sibat dan Monjj	4 bulan	5,610,000	PBH	√	.		Pebruari, Mei, Agustus, November
	4	Pembinaan Jaga Warga	Kalurahan	1 Ls	Pengurus Jaga Warga	2 bulan	5,300,000	PBH	√			Pebruari, Juli
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan						<b>12,200,000</b>					
	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kalurahan		Pelatih kesenian		-	PAD	√			
	2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Kalurahan		Grup kesenian		-	PAD	√			
	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Kalurahan	1 Ls	Pemkal dan Masyarakat	3 bulan	6,200,000	DLL	√			Juni - Agustus
	4	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	Kalurahan	1 Ls	Ustadz/ustadzah dan rois	4 bulan	6,000,000	DLL	√			Maret, Juni, September, Desember
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga						<b>6,297,500</b>					
	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Kalurahan		Kontingen atlit kalurahan		-	PBH	√			
	2	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	Kalurahan		Pemuda/ Karang taruna		-	DLL	√			
	3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	1,180,000	DLL	√			12 bulan
	4	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Kalurahan	1 Ls	Karangtaruna	1 bulan	3,275,000	DLL	√			Mei / September
	5	Operasional Karang Taruna	Kalurahan	1 Ls	Karangtaruna	12 bulan	1,842,500	PBH	√	.		12 bulan
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat						<b>16,410,350</b>					
	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kalurahan	1 Ls	LPMP dan LPMK	1 bulan	2,155,000	DLL	√			Juni, September
	2	Pembinaan PKK	Kalurahan	1 Ls	Anggota PKK	1 bulan	2,167,500	DLL	√			Juli, November
	3	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kalurahan		KPM		-	DLL	√			
	4	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Kalurahan	1 Ls	Tim KPCKal	12 bulan	5,412,500	DLL	√	.		Januari - Desember
	5	Pembinaan RT/RW	Kalurahan		Ketua RT/RW		-	PBH	√			
	6	Operasional LPMD dan/atau LPMD	Kalurahan	1 Ls	LPMP dan LPMK	12 bulan	1,915,000	PBH	√	.		Januari - Desember

	7	Operasional PKK	Kalurahan	1 Ls	PKK	12 bulan	4,760,350	PBH	√	.		Januari - Desember
Jumlah Per Bidang 3							<b>52,363,850</b>					
<b>4</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>											
1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan						<b>14,326,000</b>					
	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Kalurahan	9 Unit	Masyarakat	2 bulan	14,326,000	DDS	√	..		Maret - April
2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan						<b>3,945,000</b>					
	1	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	Kalurahan		Masyarakat		-	DDS	√	..		
	2	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	Kalurahan	1 Ls	Anggota Kelompok Tani / Gapoktan	1 bulan	3,945,000	DDS	√			Juli
3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga						<b>7,125,000</b>					
	1	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Kalurahan	1 Ls	Penyandang difabel		7,125,000	DDS	√			Oktober, November
4	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal						<b>6,625,000</b>					
	1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Kalurahan	2 kali	Pengurus BUMKal	1 bulan	6,625,000	DDS	√	.		Mei - September
5	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian						<b>86,214,000</b>					
	1	Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa/Kios milik Desa	Kalurahan	1 Unit	Pemkal dan Masyarakat	2 bulan	86,214,000	PAD	√	..		Oktober - November
Jumlah Per Bidang 4							<b>118,235,000</b>					
<b>5</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>											
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana						<b>7,894,000</b>					
	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	7,894,000	DDS	√	.		Januari - Desember
2	Sub Bidang Keadaan Darurat						<b>4,817,500</b>					
	1	Penanganan Keadaan Darurat	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	4,817,500	DDS	√			Januari - Desember
3	Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa						<b>22,500,000</b>					
	1	Penanganan Keadaan Mendesak	Kalurahan	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	22,500,000	DDS	√	.		Januari - Desember
Jumlah Per Bidang 5							<b>35,211,500</b>					
<b>JUMLAH TOTAL</b>							<b>4,105,334,289</b>					



Tabel 4.2  
 DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN (APBD KABUPATEN, APBD DIY, DAN APBN) TAHUN 2022  
 SERTA DANA KEISTIMEWAAN 2023

KALURAHAN : NGORO-ORO  
 KAPANEWON : PATUK  
 KABUPATEN : GUNUNGKIDUL  
 PROPINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya (Rp)	Sumber Pembiayaan (APBN, APBD DIY, DAIS, APBD Kab.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Pemerintahan Sosial Budaya					
1	Penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kab/kota.	Kalurahan	1 kali	Ibu hamil dan nivas dgn resiko komplikasi	2,175,000	APBD Kab.
2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat	Kalurahan	1 unit	Posyandu dan Posbindu	5,000,000	APBD Kab.
3	Program pengelolaan pendidikan	Kalurahan	1 unit	Lembaga PAUD	60,000,000	APBD Kab.
4	Program pengelolaan arsip	Kalurahan	1 desa	Pemerintah Kalurahan	2,000,000	APBD Kab.
5	Program peningkatan ketentraman ketertiban umum	Kalurahan	1 angkatan	Linmas	9,635,000	APBD Kab.
6	Program pembangunan pariwisata	Kalurahan			500,000,000	Dana Keistimewaan
Jumlah Bidang A					578,810,000	

B	Bidang Ekonomi					
1	Pelatihan olahan makanan aneka mocav dan casava	Kalurahan	1 kali	UMKM	14,000,000	APBD Kab.
2	Pelatihan pengolahan pasca panen hasil pertanian	Kalurahan	2 kelompok	Kelompok tani	14,000,000	APBD Kab.
3	Pelatihan olahan makanan aneka olahan pisang	Kalurahan	1 kali	UMKM	12,500,000	APBD Kab.
4	Pelatihan olahan makanan aneka olahan jagung	Kalurahan	1 kali	UMKM	12,500,000	APBD Kab.
5	Pelatihan olahan makanan aneka olahan ketela	Kalurahan	1 kali	UMKM	12,500,000	APBD Kab.
Jumlah Bidang B					65,500,000	
C	Bidang Pembangunan					
1	Pemberian Stimulan Bedah Rumah	Kalurahan	15 KK	Masyarakat	262,500,000	APBD Kab.
2	Pengadaan peralatan bank sampah	Kalurahan	9 set	Bank Sampah	18,000,000	APBD Kab.
3	Pengadaan alat pencacah sampah organik	Kalurahan	9 unit	Masyarakat	450,000,000	APBD Kab.
4	Pembinaan Ekowisata	Kalurahan	1 desa	Pokdarwis	4,000,000	APBD Kab.
5	Pembangunan sekretariat bank sampah beserta isinya	Kalurahan	9 unit	Bank Sampah	1,350,000,000	APBD Kab.
Jumlah Bidang C					2,084,500,000	
JUMLAH TOTAL					2,728,810,000	